

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber pendapatan tertinggi dari sektor pertanian, khususnya dari komoditas tanaman pangan yaitu sebesar 66,23% (Dinas Pertanian Povinsi Jawa Timur, 2013). Tahun 2018 produktivitas tanaman pangan di Jawa Timur sebesar 69,308 Ton per Hektar. Sektor pertanian Jawa Timur menyumbang sekitar 12,80 % bagi pendapatan daerah Jawa Timur (BPS Jawa Timur, 2018). Hal tersebut tidak terlepas dari adanya keberadaan penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian memiliki kedudukan yang strategis dalam pembangunan, khususnya dalam melakukan perubahan perilaku kepada pelaku utama dan pelaku usaha (Zulfikar, et.al, 2018).

Permasalahan penyuluh pertanian secara umum terletak pada jumlah penyuluh yang masih belum sesuai dengan standart pada UU No 16 tahun 2006 bahwa minimal satu desa satu penyuluh. Masalah lain yang terjadi saat ini dalam penyuluhan pertanian adalah peningkatan kompetensi penyuluh yang berjalan kurang efektif jika dilihat dari kurangnya program penyuluhan yang mendidik petani agar lebih mampu dalam mengambil keputusan secara pribadi (Putra, 2005). Saat ini tidak semua penyuluh memiliki kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh yang profesional dalam menyampaikan inovasi baru kepada petani (Asngari dalam Zulfikar, 2018). Salah satu daerah yang memiliki permasalahan tersebut adalah Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik hanya memiliki 156 penyuluh terbagi atas 34 penyuluh PNS, 45 penyuluh THLTBPP, dan 77 penyuluh Swadaya. Dan tersebar ke 18 kecamatan dan 356 desa (Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, 2016).

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang melakukan pengembangan pengelolaan kawasan pertanian berkelanjutan. Tahun 2017 produksi padi sawah di Kabupaten Gresik mencapai 445 498 ton. Meningkat 2,41 persen dibanding produksi pada tahun 2016 sebesar 419.713 ton. Kabupaten Gresik memiliki luas lahan pertanian sawah sebesar 35.779 Hektar (BPS Kabupaten Gresik, 2018). Menurut RT RW Kabupaten Gresik tahun 2010-2030 wilayah yang dijadikan kawasan pengelolaan pertanian yaitu Kecamatan Duduksampeyan, Cerme, Benjeng, Balongpanggang, Kebomas, Menganti,

Kedamean, Wringinanom, Driyorejo, Dukun, Bungah, Manyar, Sidayu, Ujungpangkah, Panceng, Sangkapura dan Kecamatan Tambak.

Kecamatan Cerme merupakan salah satu daerah yang dijadikan kawasan pengembangan pertanian. Komoditas yang banyak dibudidayakan di Kecamatan Cerme yaitu tanaman padi. Produksi padi di Kecamatan Cerme pada tahun 2017 mencapai 59.447 ton/tahun. Tertinggi ketiga setelah Kecamatan Bungah (128.215 Ton/Thn) dan Kecamatan Benjeng (60.356 Ton/Thn) (BPS Kabupaten Gresik 2018). Kecamatan Cerme memiliki sebanyak 6 penyuluh pertanian lapang (PPL) dengan rincian 2 penyuluh PNS dan 4 THL-TBPP dan terbagi ke 25 desa (BPP Kecamatan Cerme, 2018). Jika didasarkan UU No 16 tahun 2006, jumlah tersebut belum memenuhi jumlah ideal untuk penyuluh pertanian. Rata-rata satu penyuluh menangani 5 desa. Desa Kandangan merupakan salah desa binaan BPP Kecamatan Cerme, meskipun Desa Kandangan memiliki kelompok tani yang aktif dalam kegiatan penyuluhan, akan tetapi dalam hal produktivitas masih rendah dibandingkan dengan desa yang kelompok taninya kurang aktif dalam penyuluhan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Luas Lahan, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Padi di Desa Aktif dan Kurang Aktif Penyuluhan Pertanian Kecamatan Cerme Tahun 2018

Daerah Aktif Penyuluhan			
Desa	Sukoanyar	Guranganyar	Kandangan
Luas Lahan (Ha)	211,30	133,80	386,00
Produksi (Ton)	2.935,71	1.959,62	4.833,29
Produktivitas (Ton/Ha)	13,89356365	14,64588939	12,52147668
Daerah Kurang Aktif Penyuluhan			
Desa	Ngembung	Dungus	Pandu
Luas Lahan (Ha)	114,6	250,70	119,8
Produksi (Ton)	1.824,09	3.216,01	2.070,85
Produktivitas (Ton/Ha)	15,91701571	12,82812126	17,28589316

Sumber: BPP Kecamatan Cerme, 2019.

Permasalahan tersebut dapat terjadi karena kurangnya jumlah Penyuluh Pertanian Lapang (PPL). Petani sebagai sasaran objek penyuluhan dianggap mengetahui kompetensi Penyuluh Pertanian Lapang (PPL). Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang persepsi petani terhadap kompetensi Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) di Desa Kandangan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi petani terhadap kompetensi penyuluh pertanian lapang (PPL) di Desa Kandangan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik?
2. Apa saja faktor yang berhubungan dengan persepsi petani terhadap kompetensi Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) di Desa Kandangan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengukur persepsi petani terhadap kompetensi penyuluh pertanian lapang (PPL) di Desa Kandangan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
2. Menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi petani terhadap kompetensi penyuluh pertanian lapang (PPL) di Desa Kandangan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penyuluh, sebagai pertimbangan pemikiran untuk meningkatkan kompetensi dan juga untuk mengetahui persepsi petani terhadap kompetensi penyuluh PPL
2. Bagi penulis, mengimplementasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama perkuliahan di kampus Universitas Trunojoyo Madura.
3. Bagi pembaca, sebagai referensi penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya pada menganalisis persepsi petani terhadap tingkat kompetensi penyuluh pertanian dan faktor yang berhubungan dengan persepsi petani terhadap kompetensi penyuluh pertanian.